

# PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT

Aisyah Safitri, Ariusni

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

[Aisyahsafitriharahap454@gmail.com](mailto:Aisyahsafitriharahap454@gmail.com), [ariusni@gmail.com](mailto:ariusni@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of regional financial performance, labor force participation rates, and inflation on economic growth in West Sumatra. The data used are secondary data in the form of time series with a period of time from 1987 to 2017, with the technique of collecting data documentation and library studies obtained from the institutions and agencies concerned. The variables used are government expenditure, investment, balance funds, labor force participation rates, inflation and economic growth. The research methods used are: (1) Ordinary Least Square (OLS), (2) Classical Assumption Test. The results of the study show that (1) Government expenditure has a positive and significant effect on economic growth. (2) FDI investment has a negative and not significant effect on economic growth. (3) Balancing Funds have a positive and significant effect on economic growth. (4) Work Force Participation Level has a negative and significant effect on economic growth. (5) Inflation has a negative and significant effect on economic growth (6) Government Expenditures, Investment, Balancing Funds, Labor Force Participation Levels and Inflation have a significant effect on economic growth in West Sumatra.*

**Keywords:** *Child Welfare, Income, Female Literacy Rate, Government Expenditure and Ordinary Least Square (OLS).*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa time series dengan kurun waktu dari tahun 1987 sampai 2017, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari lembaga dan instansi yang terkait. Variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah, investasi, dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode Penelitian yang dipakai yaitu: (1) Analisis Regresi Berganda (OLS), (2) Uji Asumsi Klasik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Investasi PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (3) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (5) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (6) Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dana Perimbangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.*

**Kata Kunci** : *Economic Growth, Investment, Balancing Funds, TPAK, Inflation, Ordinary Least Square (OLS).*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat salah satu keberhasilan suatu negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Salah satu tujuan adanya kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja yang dijadikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan yang dilakukan di Sumatera Barat mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah sebesar 5,49 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,75 persen. Pada tahun yang sama pengeluaran pemerintah pada tahun tersebut mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 4.022.256,960 menjadi Rp 4.504.037,259 . Hal ini menunjukkan bahwa kejadian ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka akan semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peningkatan investasi. Dimana setiap peningkatan investasi akan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada model pertumbuhan eksogen, peranan PMA terhadap perekonomian adalah sebagai penambahan modal yang mendorong pertumbuhan sampai mencapai tingkat kondisi mapan (*steady state*) yang baru namun dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan tidak permanen (Worz, 2006).

Pada otonomi daerah, pemerintah diharapkan mampu mandiri mengerangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah tenaga kerja. Tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh keadaan penduduk dan angkatan kerjanya. Tingginya jumlah angkatan kerja memerlukan lapangan kerja yang luas. Pada masalah kesempatan kerja mempunyai kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ketika kesempatan kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat.

Inflasi adalah peningkatan harga barang secara keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak harga barang naik secara serentak (Case and Fair, 2007). Inflasi ini dapat dihitung dengan melihat jumlah barang dan jasa serta menghitung peningkatan rata-rata harganya selama beberapa periode waktu tertentu. Jika inflasi suatu daerah rendah akan memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonominya, dan begitu juga sebaliknya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Menurut Jhingan (2012), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan.

Menurut Kuznet dalam Jhingan (2012) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan output suatu negara dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya (Todaro, 2003).

Output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian bergantung pada kualitas input yang tersedia, seperti modal dan tenaga kerja, produktivitas dari input tersebut. Hubungan antara output dan input dijelaskan dengan menggunakan fungsi produksi sebagai berikut (Nanga, 2005):

$$Y = A f(K, N) \quad (1)$$

Dimana Y adalah Total Output; K adalah Jumlah Modal; N adalah Jumlah Tenaga Kerja; dan A adalah Produktivitas.

Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah hubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (Arsyad, 2005).

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli barang dan jasa akhir, dimana pengeluaran pemerintah untuk tunjangan sosial tidak termasuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah (Manurung, 2008). Jadi, pengeluaran pemerintah merupakan pembelian berupa barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan negaranya.

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori dari identitas pendapatan nasional menurut pandangan Keynesian dan campur tangan pemerintah dalam

perekonomian. Rumus pendapatan Nasional berasal dari identitas sebagai berikut (Mankiw, 2007):

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad (2)$$

Dimana Y adalah Pendapatan Nasional; C adalah Konsumsi; I adalah Investasi; G adalah Pengeluaran Pemerintah dan X-M adalah Net Ekspor.

Dapat dilihat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Pengeluaran Pemerintah (G) mempunyai pengaruh positif terhadap besaran pendapatan nasional (Y), semakin besar G maka akan semakin besar pula Y. Perekonomian akan tumbuh karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sebagaimana diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003).

### **Investasi**

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004).

Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masa yang akan datang.

Menurut UNTACTTAD dalam World Investment Report 2002 Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dan merefleksikan kepentingan dan kontrol yang abadi dari suatu badan hukum di suatu perekonomian (Investor langsung asing atau perusahaan induk) terhadap perusahaan di suatu perekonomian diluar investor asing (perusahaan FDI atau perusahaan afiliasi atau afiliasi asing).

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dan upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian atas desentralisasi. Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing, Sidik 2000 dalam (Halim, 2004).

Dalam Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 2000, tentang dana perimbangan, dijelaskan bahwa salah satu penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pembangunan daerah. Dana perimbangan terdiri dari 1) Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan dana penerimaan dari sumber daya alam, 2) Dana Alokasi Umum, dan 3) Dana Alokasi Khusus.

Dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah untuk mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antar

daerah sehingga setiap daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dana transfer dari pusat sebagai pendapatan daerahnya.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Mulyadi (2003) mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentasi penduduk dalam kelompok umur tersebut. Tenaga kerja adalah salah satu pendorong untuk pertumbuhan ekonomi, jika diimbangi dengan lapangan kerja yang luas. Dimana ketika tenaga kerja yang banyak serta diimbangi dengan lapangan kerja yang luas maka produksi akan semakin meningkat yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Modal manusia (*human capital*) adalah salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya modal manusia yang berkualitas, maka kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan keterampilan (*skill*) penduduk dan yang berdampak pada peningkatan pada produktifitas dan kreatifitas mereka. Tingkat Partisipasi angkatan Kerja digunakan sebagai indikator yang menggambarkan tingkat penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, dengan rumus (Badan Pusat Statistik):

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)}} \times 100\% \quad (3)$$

Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan keikutsertaan tenaga kerja dalam bekerja baik secara formal maupun secara informal.

### **Inflasi**

Menurut Manurung (2005), inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat secara umum dan terus-menerus. Jadi suatu keadaan dikatakan inflasi jika pada waktu yang lama dan berkelanjutan. Inflasi merupakan peningkatan keseluruhan barang-barang dan jasa yang terjadi karena permintaan tambahan besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (Mankiw, 2003).

Inflasi adalah keadaan dimana adanya kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Inflasi terjadi karena tidak seimbang antara arus barang dan arus uang disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi adalah hal yang paling penting dalam perekonomian suatu negara. Ketika inflasi suatu negara tinggi akan berdampak pada pertumbuhannya, karena inflasi akan menghambat pembangunan ekonomi dan aktifitas perekonomian bagi masyarakat. Sebaliknya, jika inflasi suatu negara rendah maka pertumbuhannya juga akan semakin baik.

## **METODE PENELITIAN**

**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, TPAK dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat**

Data yang digunakan dalam ini adalah *time series* yaitu data dari tahun 1987 sampai 2017 di Sumatera Barat. Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y), Pengeluaran Pemerintah (X<sub>1</sub>), Investasi Swasta (X<sub>2</sub>), Dana Perimbangan (X<sub>3</sub>), TPAK (X<sub>4</sub>), dan Inflasi (X<sub>5</sub>).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel X mempengaruhi variabel Y. Kontribusi variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dengan fungsi:

$$Y_t = f(X_{1t}, X_{2t}, X_{3t}, X_{4t}, X_{5t}, U_t) \quad (4)$$

Model ekonomi tersebut kemudian ditransformasikan kedalam model persamaan Regresi Linear Berganda semi Logaritma sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_{1t} + \beta_2 \text{Log}X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + U_t \quad (5)$$

Dimana Y<sub>t</sub> adalah pertumbuhan Ekonomi; β<sub>0</sub> adalah konstanta; β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>4</sub>, β<sub>5</sub> adalah Koefisien Regresi Variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, dan X<sub>5</sub>; U<sub>t</sub> adalah Error Term; X<sub>1</sub> adalah Pengeluaran Pemerintah; X<sub>2</sub> adalah Investasi Swasta; X<sub>3</sub> adalah Dana Perimbangan; X<sub>4</sub> adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; dan X<sub>5</sub> adalah Inflasi.

### Defenisi Operasional

Tabel 1 Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, TPAK dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Variabel	Definisi
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah pertumbuhan PDRB Sumatera Barat dengan mengambil data PDRB Harga Konstan 2010 dari tahun 1987 hingga tahun 2017, dinyatakan dalam persentase.
Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran pemerintah adalah jumlah belanja yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Belanja yang dilakukan pemerintah ini dinyatakan dalam jumlah satuan ribu rupiah pertahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Belanja Pemerintah Sumatera Barat dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2017 dan satuan yang digunakan adalah rupiah.
Investasi Swasta	Dengan adanya investasi yang dilakukan swasta yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan perusahaan dan membuka lapangan pekerjaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat dari tahun 1987 sampai 2017 dinyatakan dalam rupiah.
Dana Perimbangan	Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer oleh pemerintah daerah dari pusat maupun provinsi yang digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisasi Dana Perimbangan dari tahun 1987 sampai 2017 dengan satuan rupiah

TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan banyak orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 1987 sampai 2017, dinyatakan dalam persentase.
Inflasi	Inflasi merupakan peningkatan seluruh harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan tambahan yang besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Data yang digunakan adalah laju inflasi yang di peroleh dari BPS dari tahun 1988- 2017 dinyatakan dalam persentase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Estimasi Persamaan Linear Berganda pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah,TPAK dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data *time series* dari tahun 1987 sampai 2017. Data tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi *eviews* 8 dan hasil penelitian Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah,TPAK dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2 memperlihatkan hasil estimasi adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,8126+0,6931X_1-0,3404X_2+ 1,71E-12X_3-0,2183X_4-0,1371X_5 \quad (6)$$

Dimana, Pengeluaran Pemerintah ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Dengan nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar 0,693126. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,693126 persen. Investasi Swasta ( $X_2$ ) berpengaruh negatif dan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,340455. Ini memperlihatkan apabila investasi meningkat 1 satuan, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,340455 persen. Dana Perimbangan ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,71E-12. Ini memperlihatkan apabila Dana Perimbangan naik 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,71E-12 persen. TPAK ( $X_4$ ) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) . Dengan nilai koefisien -0,218300. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan TPAK sebesar 1 satuan maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,218300 persen. Inflasi ( $X_5$ ) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Dengan nilai koefisien sebesar -0,137190. Hal ini memperlihatkan apabila terjadi peningkatan inflasi 1 satuan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,137190 persen.

Tabel. 2

Hasil Estimasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah,TPAK  
Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Sample: 1987 2017

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.812603	3.782820	2.329639	0.0282
LOG(X1)	0.693126	0.314668	2.202722	0.0371
LOG(X2)	-0.340455	0.306875	-1.109424	0.2778
X3	1.71E-12	8.15E-13	2.099855	0.0460
X4	-0.218300	0.070898	-3.079084	0.0050
X5	-0.137190	0.016931	-8.102841	0.0000
R-squared	0.777557	Mean dependent var		5.127419
Adjusted R-squared	0.733069	S.D. dependent var		2.594499
S.E. of regression	1.340459	Akaike info criterion		3.595886
Sum squared resid	44.92073	Schwarz criterion		3.873432
Log likelihood	-49.73623	Hannan-Quinn criter.		3.686359
F-statistic	17.47768	Durbin-Watson stat		1.189772
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil estimasi yang ada pada tabel 2 memperlihatkan bahwa dalam pengaruh pengeluaran pemerintah positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dimana ketika pengeluaran pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,67 dengan probabilitas sebesar  $0.0371 < 0,05$  persen. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan meningkat sebesar 0,67 persen.

Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh bahwa pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pada tahun yang akan datang. Sejalan pula dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2012) yang menyebutkan bahwa peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan pada penelitian yang dilakukan oleh Meri Anitasari dan Ahmad Soleh (2015) ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain peningkatan pengeluaran pemerintah akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007) tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional, menekankan pengaruh pengeluaran pemerintah baik belanja barang maupun investasi pemerintah, yang disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

### **Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil estimasi yang ada pada tabel 2 memperlihatkan bahwa pengaruh investasi swasta negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dimana ketika investasi swasta meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar  $-0,34$  dengan probabilitas sebesar  $0,2778 > 0,05$  persen. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi swasta 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan menurun sebesar  $0,28$  persen.

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena kondisi investasi di Sumatera Barat sangat berfluktuasi. Selain itu, karena Sumatera Barat belum menjadi salah satu bagian dari prioritas sebagai tempat untuk menginvestasikan modal bagi para investor asing. Banyaknya hambatan masuk bagi investor asing, dan birokrasi yang kurang efisien juga merupakan salah satu penyebab investor asing tidak menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

Hasil penelitaian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah yang memberikan kesimpulan bahwa PMA tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Tingkat Dana Perimbangan Terhadap Perumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil estimasi yang ada pada tabel 2 memperlihatkan bahwa pengaruh dana perimbangan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dimana ketika dana perimbangan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar  $1,71$  dengan probabilitas sebesar  $0,0460 < 0,05$  persen. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan dan perimbangan 1 satuan maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan meningkat sebesar  $0,71$  persen.

Hasil pengujian hipotesis regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan (DP) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Kontribusi dari masing-masing komponen penerimaan dalam total APBD Provinsi Sumatera Barat bahwa penyumbang terbesar dalam penerimaan APBD adalah dana perimbangan. Sehingga memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi Sumatera Barat dalam pemerintahannya masih sangat tergantung dana dari pusat.

Sesuai pendapat Bahl dan Oates (Hadi Sasana, 2009:106-107) yang mengemukakan bahwa peranan dana perimbangan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Khususnya dalam desentralisasi fiskal dana perimbangan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan

kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang- barang publik.

### **Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil estimasi yang ada pada tabel 2 memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,22 dengan probabilitas sebesar  $0.0050 < 0,05$  persen. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan menurun sebesar - 0,34 persen.

Hal tersebut bertolak belakang dengan hipotesis penelitian dimana TPAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan TPAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat salah satu penyebabnya adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang diharapkan. Dimana pertumbuhan penduduk semakin meningkat tidak diimbangi dengan persediaan lapangan pekerjaan serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Yang akan meningkatkan pengangguran yang secara langsung dan akan menurunkan pendapatan perkapita dan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Anna Amelia (2010) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan pengaruh yang signifikan tetapi memiliki hubungan negatif terhadap PBRD. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak akan menambah keuntungan suatu daerah tanpa diimbangi dengan tercukupinya lapangan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat

### **Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera barat**

Berdasarkan hasil estimasi yang ada pada tabel 2 memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang inflasi negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dimana ketika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun . Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,14 dengan probabilitas sebesar  $-0.0000 < 0,05$  persen. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan menurun sebesar -0,14 persen.

Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan negatif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh inflasi. Karena ketika tingkat inflasi naik maka masyarakat cenderung mengurangi konsumsinya dengan meminimalisir pengeluarannya, sehingga hal ini akan berdampak pada menurunnya produktifitas kegiatan perekonomian yang selanjutnya akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang akan semakin menurun. Sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya inflasi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Hasil penelitian yang didukung dalam Nopirin (2000:32) yang menyatakan bahwa efek inflasi terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan

tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Jika seseorang yang pendapatannya tetap akan dirugikan dengan adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas akan merasa merugi dengan adanya inflasi. Namun pihak yang mendapatkan keuntungan dari adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentasi yang lebih besar dari laju inflasi atau yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentasi lebih besar dari laju inflasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan masyarakat yang berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut juga akan menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Sukirno (2000:16) yang juga menyatakan bahwa prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin buruk jika inflasi tidak dikendalikan. Inflasi cenderung menjadi bertambah cepat apabila tidak dapat diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut akan mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Sehingga, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat seiring dengan penurunan produktifitas ekonomi di dalam suatu negara.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Attari (2013) yang berjudul "Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980- 2010", menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

## **SIMPULAN**

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengeluaran pemerintah menggunakan data belanja yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Pengeluaran pemerintah ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana ketika peningkatan pengeluaran pemerintah akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, sehingga dengan adanya pekerjaan maka masyarakat akan memperoleh pendapatan yang akan meningkatkan konsumsinya serta akan mendorong peningkatan output dan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 2) Investasi swasta menggunakan data Realisasi PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Ketika investasi penanaman modal asing yang dilakukan di Sumatera Barat meningkat maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga akan meningkat. Namun dalam penelitian ini peningkatan investasi PMA di Sumatera Barat tidak mampu meningkatkan Perekonomian di Sumatera Barat. 3) Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Peningkatan dana perimbangan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dengan adanya peningkatan dana perimbangan ini akan mendukung peningkatan pelayanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 4) Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak akan menambah keuntungan bagi suatu daerah tanpa diimbangi produktifitas tenaga kerja yang tinggi dan tercukupinya lapangan kerja yang dibutuhkan untuk

melakukan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. 5) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan perekonomian di Sumatera Barat. 6) Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dana perimbangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan inflasi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, Anna. 2010. *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (Pma), Tenaga Kerja, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Periode Tahun 1985*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anitasari, Meri dan Ahmad Soleh. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat Dalam Angka* , BPS.
- Case, Karl E dan Fair Ray C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa Wibi Hardani dan Devri Barnadi. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar- Dasar Ekonometrika*. Edisi ke Tiga, Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Selemba Empat. Jakarta.
- Hasan, dkk. 2013. "Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 3 No.1. 41-49.
- Herlambang, T., Sugiarto, Bastoro dan Said K, 2001. *Ekonomi Makro; Teori Analisis dan Kebijakan*. Gramedia, Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Lincoln, Arsyad. 2005. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Mankiw, N.Gregory. 2003. *Teori ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- \_\_\_\_\_. 2006. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Mutia, dkk .2016 . “*Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* Volume 3 Nomor 2, November 2016 ISSN. 2442-7411.
- Nanga, Mauna. 2005. *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. ISBN979-421-85-3.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter Buku II*. Yogyakarta: BPFE.
- Paramita dan Purbadharmaja. 2015. “*Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali*”. Universitas Udayana Bali.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Salhab, Amira dan Lasmini Soedjono. 2010. *Pengaruh Inflasi Jumlah Tenaga Kerja Dan Penegluran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Bali*.
- Samuel dan Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Media Global Edukasi.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sodik, Jamzani. 2007. *Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional: Studi kasus data panel di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 12 No.1, April 2007 Hal: 27- 36 .Yogyakarta.
- Tarigan , Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 1, (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta
- Todaro, Michael P, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 1, Edisi Kedelapan (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta.
- UNCTAD. (2002). *World Invesment Report 2002: Transnational Corporation And Export Competitiveness*.
- Prasetyo,Eko. 2011. *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, Dan Ekspor Terhadap*

*Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Periode Tahun 1985*. Universitas Negeri Semarang.

- Wahyuni. 2014. “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*”. EJurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4. No.6: 112-123.
- Wibisono, Yusuf. 2003. “*Kovergensi di Indoneisa, Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya*”. Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol. 51(1). LPEM, Jakarta.
- Wijaya, H.A.W. “*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*”. 2004. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wu, Shih- Ying dkk. (2010). “*The impact of government expenditure on economic growth: How sensitive to the level of development*”. Journal of Policy Modelling 32 ( 2010) 804- 817.
- Zhiqiang, dkk .2000. “*Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change*”. Vol.. 49, No.5: 114-121.